



KONSEP MODERASI BERAGAMA DI KERAJAAN MAROKO

FAKIH ABDUL AZIS

STAI AL-ANWAR - REMBANG

fakihaziz@staialanwar.ac.id

Abstract

This study explains the concept of Islamic Moderation in Morocco. It's an interesting theme for us to observe and study together. Considering that the Moroccan government is one of the successful countries in protecting its territory from the threat of Islamic radicalism groups. Furthermore, the jihadist group launched its attack in Casablanca in 2003. Based on this background, the government, in this matter is King Muhammad VI, considers there is an urgent need to reconstruct Moroccan Islamic moderation. With a view to ensuring the stability of religious, social, cultural and political security in the domestic and regional areas of West Africa. The data was collected through a combination of qualitative studies and field observations of moderation that has been carried out over the past twenty years. The data explains that diversity tolerance has been going on for a long time. Studying King Muhammad VI's decision at His Dhahir al-sharief, the moderation developed by Morocco encompasses several lines. First, by normalizing minority relations represented with the original Moroccan Jews. Second, by building the Institute of Takwin Al-Aimmah in order to bring about the priests of the mosque to have moderate Islamic visions and loving deeply their own homeland.

Keyword: Moderation, Islam, Morocco, Jewish, Tolerance.

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang tawaran Moderasi Islam dari Maroko. Sebuah tema yang menarik untuk kita cermati dan telaah bersama. Mengingat kerajaan Maroko merupakan salah satu negara yang sukses dalam menjaga wilayahnya dari ancaman kelompok radikalisme berbasis agama. Terutama setelah kelompok salafi-jihadis melancarkan serangannya di Casablanca pada tahun 2003. Berangkat dari latar belakang inilah, pemerintah kerajaan Maroko dalam hal ini adalah Raja Muhammad VI menganggap adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan moderasi Islam ala Maroko. Dengan se-



buah tujuan untuk memberikan stabilitas keamanan beragama, bersosial, budaya dan politik wilayah domestik dan regional Afrika Barat. Penelitian ini mengambil data dari studi kualitatif serta observasi lapangan tentang moderasi yang sudah terlaksana selama dua puluh tahun terakhir. Berikut dengan data yang menjelaskan bahwa toleransi beragama telah berjalan sudah berlangsung sejak lama. Mengkaji keputusan Raja Muhammad VI dalam *dhahir al-Syarif-nya*, moderasi yang dikembangkan oleh Maroko meliputi berbagai lini. Pertama dengan melakukan normalisasi hubungan kaum minoritas yang terwakili dengan orang Yahudi asli Maroko. Kedua dengan membangun Institut Takwin Al-Aimmah dalam rangka untuk mencetak para imam masjid yang berwawasan moderat Islam dan berkebangsaan yang cinta tanah air.

Kata Kunci : Moderasi, Islam, Maroko, Yahudi, Toleransi.

A. Pendahuluan

Saat ini seruan untuk melakukan moderasi beragama kian deras. Baik itu dari kalangan penyuluh agama, pendakwah maupun para akademisi. Hal tersebut berangkat dari berbagai konflik yang terjadi dalam dunia sekarang. Utamanya konflik keagamaan yang banyak terjadi di belahan Timur Tengah. Yang mana notabene mayoritas penduduknya beragama Islam. Moderasi dalam Islam secara eksplisit telah dijelaskan melalui al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut terdapat kata *al-Wasath* yang bermakna "Umat pertengahan"¹. Indahnyanya, ayat ini terletak persis di tengah-tengah surat al-Baqarah yang berjumlah total 286 ayat. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah SWT telah mengatakan Islam merupakan ajaran yang telah menetapkan arah ummatnya sebagai umat yang selalu moderat. Berada di tengah-tengah dalam

¹ *Al-Quran Terjemah*, Kemenag Republik Indonesia , Edisi Penyempurnaan 2019



menyikapi dalam sebuah perbedaan, baik perbedaan antar agama ataupun mazhab. Islam moderat juga selalu menjunjung tinggi sikap menghargai, toleran serta tetap menghargai ajaran atau pemeluk keyakinan lain.

Dalam al-Qur'an juga terdapat banyak ayat yang menunjukkan karakteristik umat Islam, ajaran Islam dan misinya. Salah satu ciri umat Islam adalah selalu berpihak kepada kebenaran (*Hanif*)². Kemudian dengan berjuang menegakkan keadilan agar menjadi umat yang terbaik (*khair ummah*)³. Umat terbaik yang sesuai dengan visi dan misi nabinya yang merahmati, menebar kasih sayang kepada seluruh alam⁴. Sehingga pada saat ini banyak sekali negara yang mencoba menerapkan konsep moderasi Islam (*wasathiyyah al-Islam*). Salah satu diantara negara tersebut adalah Kerajaan Maroko. Sebuah kerajaan yang terletak di daerah ujung utara Benua Afrika. Kerajaan Maroko dihuni penduduk dengan suku dan agama yang berbeda. Terdiri dari ragam suku, diantaranya; suku asli Amazigh, Arab (keduanya beragama Islam), Yahudi dan Kristen dari para penjajah Prancis dan Spanyol.

Hubungan antara suku Arab Islam dengan Yahudi Maroko dan Kristen pendatang bukan hal yang baru. Yahudi datang ke Maroko sejak abad ke 9 sebelum masehi. Mereka pindah atas kerjasama dagang antara raja Nabi Sulaiman (960-922 SM) dengan

² QS. Al-Rum : 30

³ QS. Ali Imran 110

⁴ QS. Al-Anbiya 107



suku Finiqi penduduk asli⁵. Salah satu isi dari perjanjian kerjasama tersebut adalah mengirim para budak-budak. Maka diutuslah para budak Yahudi untuk menetap disana. Ditambah dengan peristiwa Kerajaan Yudea yang dihancurkan oleh raja Nebukadnezar II dari Babilonia pada abad tahun 606 SM membuat keturunan Yahudi semakin banyak yang hijrah dan menetap di Maroko ⁶.

Sekarang Maroko merupakan negara yang berbentuk kerajaan yang dikuasai oleh Dinasti Alawiyyin. Dinasti yang berkuasa sejak tahun 1666 Masehi. Dalam Undang-undang dasarnya, kerajaan ini telah menetapkan gelar raja sebagai *Amirul Mukminin*⁷. Dan Islam sebagai agama resmi negara⁸. Selain itu, lanjutan pasal 3 ini juga menjelaskan bahwa “negara menjamin kebebasan setiap masing-masing orang untuk melaksanakan praktik keagamaannya”⁹. Sehingga, praktik keagamaan yang lain seperti Kristen, Yahudi berjalan bebas tanpa ada tekanan. Bahkan kerajaan ini juga telah membiayai renovasi gereja “ *al-Qalbu al-Muqoddas* “ di Casablanca menggunakan anggaran negara¹⁰.

⁵ Ahmad Sehat Haikal , *Yahud Al-Magrib ; Tarikhuhum wa ‘Alaqtuhum bi Al-Harakah Al-Shahyuniyah* , (Cairo : Markaz Al-Dirasat Al-Syarqiah , 2007) , Hal 12

⁶ Ibid, Hal. 12

⁷ Pasal 41, *Dustur al-Mamlakah al-Maghribiyah*, 2011, Hal 18

⁸Ibid. Hal. 4

⁹ Ibid.

¹⁰ Selengkapnya lihat

<https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-540585.html> (diakses tanggal 07 Januari 2021)



Tercatat anggaran tersebut berasal dari Rencana Pembangunan Daerah Casablanca tahun 2019 dan 2020 yang totalnya mencapai 35.000.000 Dirham Maroko.

Hal tersebut menjadi salah satu bukti nyata kerajaan Maroko dalam mengembangkan moderasi beragama dalam negaranya. Tidak hanya bermegah-megahan dengan membangun megah masjid Hassan II – Casablanca untuk umat Islam. Tetapi juga menaruh perhatian terhadap keberadaan orang Nasrani pendatang di kerajaannya. Yang total jumlahnya masih sangat sedikit.

B. Hubungan Antar Agama di Maroko

Islam datang ke daerah Maroko setelah suku Yahudi pada zaman Nabi Sulaiman AS. Lebih tepatnya ketika Uqbah bin Nafi membawanya pada tahun 96 Hijriah¹¹. Saat itu, orang Yahudi menerima keberadaan mereka dengan satu tujuan bersama. Yaitu membebaskan dari cengkaman penjajahan Imperium Romawi. Kehidupan keduanya berjalan normal dan damai selama berabad-abad berdampingan satu dengan yang lain.

Hal tersebut terbukti dengan masuknya mereka dalam pemerintahan, terutama hal yang berkaitan dengan urusan perdagangan¹². Bahkan ada yang menjadi dokter pribadi raja Yusuf

¹¹ Ibnu 'Udzari, *Al-Bayan Mughrib fi Ikhtishari Akhbari Muluk Al-Andalus wa Al-Maghrib*, (Beirut : Dar Tsaqafah, 1983) Juz 2 Hal. 26-29

¹² Said Abdul Fattah, *'Asyur, Buhuts wa Dirosaat fi Tarikh Al-'Ushur Al-Wustha* (Beirut : Universitas Beirut, 1977), Hal. 90



bin Tasyfin. Pada masanya, beliau mengangkat dua dokter dari kalangan Yahudi¹³.

Ada suatu cerita menarik yang beredar di kalangan orang Maroko tentang hubungan raja Ali bin Yusuf (1083-1143M) dinasti al-Murabithun dengan komunitas Yahudi. Pada masa pemerintahannya, beliau ingin memperluas masjid dan universitas al-Qarawiyyin. Kebetulan, tanah samping masjid adalah milik seorang Yahudi. Sang Raja, dengan segala kekuasaannya tidak mau menggunakan paksaan dengan militer atau surat perintahnya. Justru beliau menawar dan mendatangnya sendiri dengan harga tanah yang melebihi standart kala itu¹⁴. Dari tanah ini, perluasannya bisa terealisasi yang kemudian menjadi tempat imam masjid al-Qarawiyyin sekarang.

Dalam setiap tahunnya, orang Yahudi Maroko wajib membayar *Jizyah* atau pajak yang harus diberikan kepada kerajaan. Mereka tidak keberatan karena salah satu kebijakan dari raja adalah membantu membangun sinagog yang hancur¹⁵. Ada banyak kebijakan kerajaan terhadap keberadaan kaum minoritas Yahudi, seperti contoh berikut :

¹³ Abdul Wahid Al-Marrakusy, *Watsaiq Al-Murabithin wa Al-Muwahhidin* (Cairo : Maktabah Al-Tsaqafah Al-Diniyyah , 1997) Hal 25-38

¹⁴ Hamdi Abdul Mun'im , *Al-Tarikh Al-Siyasi wa Al'Hadhari li Al-Magrib wa Al-Andalus fi 'Asri Al-Murabithin* ,(Cairo : Dar Al-Ma'rifah , 1997) Hal. 338

¹⁵ Karima Bouaziz, *Daur Al-Yahud di Al- Nasyath Al-Iqtishadi fi Al-Magrib Al-Islami*, (Guelma – Aljazair : Thesis Universitas 08 Mei 1945 , 2018) , Hal. 10



1. Hak keamanan dalam penjagaan rumah , harta benda dan tempat ibadahnya. Dalam artian tidak boleh ada yang mengganggu apalagi memusuhinya.
2. Hak individual dan sosial khusus seperti jika mereka berada dalam suatu daerah yang mana mereka seorang diri atau satu keluarga, mereka berhak untuk mendirikan tempat ibadah sinagog.
3. Hak keperdataan khusus. Mereka mempunyai kebebasan dalam menjalankan hukum yang berlaku antara mereka sesuai yang tertera dalam kitab Taurat¹⁶. Seperti hak marital, hak orang tua (*ouderlijke macht*), hak perwalian (*voogdij*). Hal ini berdasarkan perintah Allah SWT dalam Al-Quran :

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۗ وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (المائدة : 43)

Artinya: Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang didalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman¹⁷.

Konsepsi dari ayat tersebut kemudian terimplementasikan dalam kebijakan kerajaan berupa penunjukan hakim dari kalangan Yahudi dan penyuluh agama dari kalangan mereka. Penunjukan tersebut juga melalui tes resmi negara. Sehingga apabila terjadi

¹⁶ Abdullah bin Thahir, *Mudawwanah Al-Usrah fi Itar Al-Mazhab Al-Maliki*, (Aljadidah : Percetakan Al-Najah 2014) cet 2, Hal. 28

¹⁷ QS Al-Maidah ayat 43



pelanggaran agama yang dilakukan oleh orang Yahudi maka segera bisa terputuskan dengan baik diantara kalangan mereka.

Merujuk pada *Dustur al-Mamlakah al-Maghribiah*, Eksistensi Kaum Yahudi tidak diakui sebagai agama resmi negara. Kerajaan Maroko telah mendeklarasikan diri menjadi negara yang berdaulat dengan Islam dan Mazhab Maliki sebagai agama dan mazhab resmi negara¹⁸. Namun, negara tetap menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, berkumpul dan kebebasan dalam hal kepercayaan lain, kepada masyarakatnya¹⁹. Maka dari itu, hak-hak mereka para Yahudi Maroko tetap dijamin oleh undang-undang dasar kerajaan.

Dalam perkembangannya, Yahudi Maroko mengalami pasang surut, dilihat dari sudut pandang demografis. Pada tahun 1947 M data kependudukan mencatat penduduk Yahudi Maroko ada sekitar 204.000 jiwa²⁰. Kemudian setelah ada ajakan untuk kembali ke tanah Palestina mereka berangsur-angsur hijrah kembali ke “Tanah yang dijanjikan”. Hal tersebut berkat dukungan materi dari penjajah Prancis untuk kembali ke Jerussalem²¹. Secara pelan tapi pasti, mereka mulai meninggalkan Maroko secara berangsur-angsur.

Maroko mendeklarasikan kemerdekaaan dari penjajahan Prancis pada tahun 1957 Masehi . Raja yang memimpin Maroko

¹⁸ *Undang-Undang Dasar Kerajaan Maroko*, Cetakan 2011, Hal. 2

¹⁹ Pasal 3 UUD Kerajaan Maroko.

²⁰ Hélène Cazes-Bénatar, *The American Jewish Year Book* (1955 : American Jewish Committee; Springer Vol. 56), Hal 446

²¹ *Ibid.*,



pada saat itu datang dari kalangan Dinasti Alawiyyin; *Amirul Mukminin* Muhammad V. Dalam pidato resmi kerajaan pertama dia mengatakan bahwa “Yahudi Maroko mendapatkan kewajiban dan hak yang sama seperti penduduk Maroko lainnya”²². Selain itu beliau juga mengangkat Léon Benzaken (Seorang Yahudi) menjadi menteri kerajaan²³. Langkah ini terbukti dapat membawa hasil, sehingga terjadilah perjanjian “pemberhentian hijrah” antara pihak pertama Amerika, Prancis, dan Israel dan pihak kedua kerajaan Maroko pada tahun 1961 M²⁴.

Selain Léon Benzaken, ada nama Serge Berdugo (Menteri Pariwisata Maroko 1993-1996 M), Simon Levy (Politisi Partai *Al-Ittihad Al-Dusturi*) dan André Azoulay (penasehat kerajaan 1990 M - sekarang). Disinilah yang menarik, secara konstitusi Kerajaan Maroko memberikan gelar kepada rajanya Muhammad VI dengan *Amirul Mukminin Wa Hami Hima Al-Millah wa Al-din*²⁵. Akan tetapi justru mempunyai *Musytasyar* atau para penasehat dari kalangan minoritas Yahudi.

Dalam hal ini, kebijakan yang dilakukan oleh kerajaan Maroko terhadap moderasi Islam sudah mencapai tahap aktualisasi nilai-nilai moderasi yaitu kolaborasi bersama dengan pemeluk

²² Lihat <https://www.maghress.com/almassae/7564> (Diakses tanggal 17 Februari 2019)

²³ Ibid.,

²⁴ Lihat https://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=5702 (Diakses tanggal 17 Februari 2019)

²⁵ Kepala negara orang Islam serta pelindung berbagai kepercayaan dan agama, selengkapnya lihat Pasal 41 UUD Kerajaan Maroko.



agama lain dalam rangka menghubungkan antara unsur yang berbeda sekaligus mencari titik temunya. Baik dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini semata ditujukan untuk menjawab tantangan dunia dengan cara baru sekaligus jawaban baru dalam mengatasi berbagai permasalahan bersama baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang.

C. Diplomasi Keagamaan Maroko

Al-Diplumasia al-Diniya atau diplomasi keagamaan merupakan aktivitas kerajaan yang tersusun dari cara menggunakan faktor agama dalam kebijakan luar kerajaan²⁶. Seperti kerjasama dengan berbagai negara dalam suatu regional tertentu dengan dalam rangka menjaga keberlangsungan praktek keagamaan seperti Islam secara umum atau Mazhab Maliki secara khusus. Maroko menganggap diplomasi keagamaan ini penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.

Maroko pernah mengalami serangan teror terbesar dalam sejarahnya. Serangan bunuh diri dari kelompok “*Salafi Jihadi*” terjadi pada tahun 2003 di Casablanca. Ada sekitar 41 orang tewas terbunuh dan 100 orang lainnya mengalami luka-luka²⁷. Selain itu, pelaku-pelaku teroris yang melakukan aksinya di benua Afrika dan Eropa kebanyakan juga berasal dari Maroko. Apalagi tercatat ada sekitar 2000-an orang Maroko bergabung ke dalam ISIS. Hal ini

²⁶ Fatima Zahra herat, *al-Dipulmasia al-Diniya al-Maghribia al-Afrika*, Majallah al-Bahsia – Rabat , 2018 M. Hal. 1

²⁷ Lihat <https://www.albayan.ae/one-world/2003-05-18-1.1244183> (Diakses 18 April 2020)



membuat Mbarka Bouaida (Menteri Luar Negeri Maroko) mengeluarkan sebuah kebijakan. Yaitu dengan sebuah pernyataan bahwa negaranya akan memulai merestrukturisasi dengan meluncurkan program “*Ta’hil Al-Haql Al-Dini* “. Sebuah program agama yang membawa visi-misi untuk mengurangi radikalisme dan terorisme dunia. Pembaharuan dalam ruang religius ini dimulai dengan mengatur ulang semua anggota dewan *Majlis Ilmi A’la* , merevisi kurikulum pendidikan madrasah, membuat channel tv nasional tentang keagamaan bernama “*Assadisa* “ dan mendirikan Institut pelatihan Imam-imam²⁸.

Khusus untuk Institut pelatihan para Imam mempunyai sebuah tujuan yang mulia. Yaitu untuk menyebarkan paham Islam moderat ke wilayah-wilayah Afrika sekaligus sebagai bentuk memerangi terorisme. Raja Muhammad VI meresmikan Institut ini dengan nama “*Ma’had Muhammad Al-Sadis Li Takwin Al-Aimmah Wa Al-Mursyidin wa Al-Mursyidaat* “ pada 27 Maret 2015 di Rabat²⁹.

Lembaga pelatihan imam ini tidak hanya dikhususkan kepada para Imam penduduk asli Maroko, tapi meluas dengan tambahan delegasi para imam dari berbagai negara. Seperti dari kawasan Afrika barat, Eropa bahkan Cina. Harapannya, dengan bergabungnya para imam dari berbagai negara ini nantinya bisa membawa nilai-nilai Islam moderat yang digunakan Maroko. Untuk diajarkan kem-

²⁸ Abdul Hakim Abou Al-Louz, *Les nouvelles orientations de la politique religieuse au Maroc* , (2016 : Jurnal *Insaniyyat* 31), Hal 1-2. Selengkapnya Lihat <https://journals.openedition.org/insaniyat/9766>. (Diakses 18 Mei 2020)

²⁹ Lihat <https://www.hespress.com/societe/259237.html> (Diakses tanggal 21 Mei 2020)



bali ketika balik ke negara asalnya³⁰. Dari negara tetangga untuk mengikuti pelatihan imam ini seperti Tunisia, Pantai Gading, Prancis, Senegal dan lain-lain³¹.

Durasi pembelajaran yang wajib diikuti oleh para Imam tersebut juga berbeda-beda tergantung darimana mereka berasal. Untuk orang Maroko masa belajarnya satu tahun, negara-negara afrika selama dua tahun, dan dari Prancis selama tiga tahun. Perbedaan ini dengan harapan bahwa tahun ketiga untuk kursus belajar bahasa Arab saja. Sehingga, mereka pulang sudah mahir berbicara dan membaca kitab yang berbahasa Arab³².

Langkah kebijakan untuk membangun Institut ini terbilang berani, sebab biaya pembangunan lembaga pelatihan mencapai 20 juta dolar dengan berbanding GDP Maroko tahun 2015 yang hanya 101,08 juta dolar USD³³. Namun, hal itu juga terbayarkan mengingat tujuan daripada institut ini adalah demi menjunjung nilai-nilai Islam moderat. Disisi lain berfungsi juga untuk meng-counter penyebaran Wahabisme³⁴. Sebuah wacana Islam yang menjadi salah satu inspirasi para kelompok-kelompok ekstremis di kawasan Timur Tengah.

³⁰ Cédric Baylocq and Aziz Hlaoua, *Les nouvelles ambitions de la diplomatie religieuse africaine du Maroc*, (2016 : Afrique contemporaine n° 257), Hal. 113

³¹ Lihat <https://www.hespress.com/societe/354158.html> (Diakses pada tanggal 18 Februari 2020)

³² Ibid.,

³³ Lihat <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=M&start=2009> (Diakses tanggal 21 Februari 2020)

³⁴ Cédric Baylocq and Aziz Hlaoua, *Les nouvelles ambitions de la diplomatie religieuse africaine du Maroc*, (2016 : Afrique contemporaine n° 257), Hal. 113

Selain menyebarkan pandangan Islam moderat dan perdamaian, pendirian Institut mohammad VI ini juga bertujuan sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan para akademisi Maroko untuk masuk dalam penerimaan Imam, Khatib dan Penceramah yang moderat dalam rangka melindungi Maroko dari radikalisme.

Posisi Imam, Khatib dan penceramah dalam peraturan perundang-undangan mendapatkan posisi sebagai pegawai negeri sipil kerajaan. Mereka memperoleh gaji bulanan dan tempat tinggal gratis. Untuk mencapai hal tersebut Kementerian Wakaf mengadakan “*Mubaraah Taudhif* ³⁵” setiap tahunnya. Pengumuman tersebut melalui laman website mereka www.habous.gov.ma . Diantara salah satu persyaratannya adalah harus hafal al-Quran dan berwawasan moderat.

2. Menjaga keberlangsungan Islam Sunni madzhab Maliki menghadapi penyebaran Islam Wahabi di dunia³⁶.

Mazhab Maliki merupakan suatu aliran dalam Hukum Islam yang didirikan oleh Imam Malik RA (93-150 H) di Madinah. Dalam dunia Islam, pengikut mazhab ini tersebar mulai dari Sudan, Libya, Tunis, Al-Jazair, Maroko, Mauritania, Mali Senegal, dan beberapa negara kecil Afrika Barat lainnya. Berbeda dengan aliran Islam Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Salah

³⁵ Tes Calon Pegawai Negeri Sipil

³⁶ Ibid., Hal 114



satu ajarannya adalah ajakan untuk tidak ber-mazhab³⁷. Islam model ini sedang di sebar-luaskan kerajaan Arab Saudi ke seluruh dunia sekarang.

3. Membiasakan untuk melestarikan identitas spiritual yang menghargai perbedaan, keterbukaan dan toleransi dalam beragama dalam masyarakat³⁸.
4. Menambahkan keterampilan tambahan seperti ilmu menjahit, ilmu listrik, komputer dan ilmu mengajar. Sehingga dengan keterampilan tambahan ini diharapkan bisa untuk menularkan keilmuannya dan mencetak imam-imam baru di negaranya.
5. Menurut Dr. Muhammad al- Az'ar (Direktur Institut pelatihan imam) peran dari institut ini adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh. Terutama yang berkaitan tentang penafsiran yang sering digunakan oleh para teroris untuk membenarkan konsep-konsep yang mereka. Seperti Bai'at, Syura (demokrasi) , salafi , dan jihad yang mana konsep tersebut telah banyak disalah fahami.

Seperti pengikuti *Salafi Yamani* dilarang oleh Ulamanya untuk memilih presiden dan pejabat di pemerintahan. Dan melarang untu

³⁷ Mohammad Said Ramadhan al-Buthi, *Alla Mazhabiya Akhtar Bid'atin Tuhaddidu al-Syariah al-Islamia*, Dar al-Farabi , 2005, Muqoddimah

³⁸ *Masyru' Naja'at Al-ada* (Proyek Efisiensi Kerja) , Kementerian Wakaf Kerajaan Maroko 2019, Selengkapnya lihat http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/pdp_habous_et_affaires_Islamiq_ues_ar.pdf (Diakses tanggal 18 Februari 2020)

berdiri memberi hormat kepada bendera dan lagu kebangsaan karena termasuk perbuatan bid'ah yang harus diingkari³⁹.

Demi mencapai tujuan diatas, Institut pelatihan imam ini juga memiliki cara yang dijabarkan dalam “*Dzahir Syarif*” atau ketetapan raja No. 1-14-103 (20 Rajab 1435 / 20 Mei 2014) yang berbunyi :

1. Pelatihan dasar ke-Imam-an bagi para imam, penceramah laki-laki dan perempuan dalam rangka mempersiapkan mereka untuk siap dengan beban yang akan diterima.
2. Melatih , mempersiapkan, dan menyempurnakan nilai-nilai agama moderat dengan pendidikan berkelanjutan bagi delegasi asing.
3. Pelaksanaan kursus lanjutan sesuai spesialisasi para imam.
4. Pelaksanaan seminar, konferensi, dan kursus-kursus untuk meningkatkan mutu keahlian dan keterampilan para imam, penceramah laki-laki dan perempuan.
5. Pengembangan penelitian yang bertujuan untuk menambah wawasan yang tepat sasaran bagi para imam , penceramah laki-laki dan perempuan.
6. Membangun hubungan kemitraan dan kerjasama dengan yayasan, lembaga, badan nasional dan Internasional yang mempunyai tujuan bersama.

³⁹ Afzalu Syahrudin, *Demokrasi dalam Pemikiran Ulama Salafi Yamani di Indonesia*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009 Hal. 9



7. Pemaparan konsultasi dalam bidang yang menjadi keahlian ,sesuai permintaan pertanyaan.
8. Publikasi hasil studi dan riset yang sesuai dengan bidang yang diminati imam⁴⁰.

Dari delapan penjabaran diatas, dua diantaranya merupakan kerangka diplomasi keagamaan yang dilakukan oleh Maroko ke kawasan Afrika barat secara khusus atau dunia secara umum melalui pendirian “*Ma’had Muhammad Al-Sadis Li Takwin Al-Aimmah Wa Al-Mursyidin wa Al-Mursyidaat*“. Dua misi tersebut adalah: pertama dengan melatih, mempersiapkan, dan menyempurnakan nilai-nilai agama moderat dengan pendidikan berkelanjutan bagi delegasi asing. Dan yang kedua, membangun hubungan kemitraan dan kerjasama dengan yayasan, lembaga, badan nasional dan Internasional yang mempunyai tujuan bersama⁴¹.

D. Penutup

Berangkat dari beberapa pernyataan diatas, setidaknya Maroko ingin memulai penyebaran nilai Islam Moderat dengan argumen bahwa memahami umat agama lain sebagai makhluk Tuhan yang harus dilindungi. Keragaman adalah *sunnatullah*. Dalam aturan hukum *fiqh* klasik juga menyebut bahwa orang Yahudi yang berada dalam kekuasaan muslim sebagai *Ahl al-dzimmah*, yaitu warga negara yang wajib dilindungi.

⁴⁰ Ibid., Hal. 64

⁴¹ Ibid.,

Hal ini sejalan dengan kebijakan yang sudah berlaku secara turun-temurun sejak adanya kerajaan Islam disana. Yaitu dengan memberikan mereka hak-hak khusus dan kebebasan menjalankan praktek agamanya sesuai dengan yang tertera dalam kitab Taurat. seperti hak keamanan , hak marital, dan hak perwalian. Selain itu juga menempatkan tokoh mereka dalam jajaran lembaga pemerintahan. Bahkan menjadi penasehat kerajaan.

Terakhir, Diplomasi keagamaan Maroko melalui Institut pelatihan Imam Muhammad VI berdampak positif bagi Maroko sebagai tuan rumah dan negara tetangganya . Sehingga kerjasama dengan negara-negara kawasan Afrika Barat akan semakin mudah dalam rangka mencapai beberapa kepentingan Maroko. Utamanya sebagai sebuah negara garda terdepan yang membawa pengaruh Islam Moderat di Afrika. Sekaligus sebagai “*counter Wahabisme*” yang sedang merajalela di wilayah regional Afrika Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim riwayat *Hafs*

Abdul Fattah ,Said. *Buhuts wa Dirosaat fi Tarikh Al-‘Ushur Al- Wustha*
, Universitas Beirut, 1977

Abdul Hakim , Abou Al-Louz. *Les nouvelles orientations de la politique religieuse au Maroc* Jurnal Insaniyyat 31 , 2016



- Abdul Mun'im ,Hamid. *Al-Tarikh Al-Siyasi wa Al'Hadhari li Al-Magrib wa Al-Andalus fi 'Asri Al-Murabithin* , Cairo : Dar Al-Ma'rifah , 1997
- Al-Marrakusy, Abdul Wahid. *Watsaiq Al-Murabithin wa Al-Muwahhidin* , Cairo : Maktabah Al-Tsaqafah Al-Diniyyah , 1997
- Bin Thahir, Abdullah. *Mudawwanah Al-Usrah fi Itar Al-Mazhab Al-Maliki*, Aljadidah : Percetakan Al-Najah cet 2, 2014
- Bouaziz, Karima. *Daur Al-Yahud di Al-Nasyath Al-Iqtishadi fi Al-Magrib Al-Islami*, Guelma : Thesis Universitas 08 Mei 1945 , 2018
- Cazes-Bénatar, Hélène. *The American Jewish Year Book American Jewish Committee*; Springer Vol. 56 1955
- Cédric Baylocq , Aziz Hlaoua. *Les nouvelles ambitions de la diplomatie religieuse africaine du Maroc*, Afrique contemporaine 2016 (n° 257)
- Masyru' Naja'at Al-ada* (Proyek Efisiensi Kerja) , Kementerian Wakaf Kerajaan Maroko 2019
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: moderasi, keumatan, dan kebangsaan*, Penerbit Kompas 2011 ,Hal 326
- Sehhat Haikal ,Ahmad. *Yahud Al-Magrib ; Tarikhuhum wa 'Alaqtuhum bi Al-Harakah Al-Shahyuniah* , Cairo :Markaz Al-Dirasat Al-Syarqiah , 2007



Udzari ,Ibnu. *Al-Bayan Mughrib fi Ikhtishari Akhbari Muluk Al-Andalus wa Al-Maghrib* , Beirut : Dar Tsaqafah 1983

Undang-Undang Dasar Kerajaan Maroko, Cetakan 2011

<https://www.albayan.ae/one-world/2003-05-18-1.1244183>

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=MA&start=2009>

https://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=5702

<https://www.hespress.com/societe/259237.html>

<https://www.hespress.com/societe/354158.html>

<https://www.maghress.com/almassae/7564>

